



# KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																											v				

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
		v									

TAHUN

2015
------

HALAMAN

2b
----

## Inspektorat Siap BKO Personel ke BPK

**TERKAIT** wacana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Kalimantan Utara untuk bekerjasama dengan inspektorat mendapat sambutan baik. Kepala Inspektorat Malinau, Pramadiyo B siap untuk memBKOkan beberapa personel mereka dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan. Dikatakan Pramadiyo, rencana tersebut telah tertuang dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2006, yaitu BPK bisa melibatkan pihak lain dengan biaya BPK untuk bekerja atas nama BPK.

"Kerja sama ini untuk ikut membantu auditor BPK dalam mengaudit laporan keuangan pemda. Nantinya tergantu permintaan dari BPK, kami siap BKO-kan personel," kata Pramadiyo.

Terkait penyampaian laporan pengelolaan keuangan ke BPKRI, menurutnya, yang perlu dipahami adalah apa itu opini. Mendirikan suatu derajat kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kuangan daerah. Ini ditunjukkan dengan 4 komponen yakni kesesuaian laporan keuangan dengan adanya kelengkapan yang memadai seperti asset, hak dan kewajiban ganda, sistem pengendalian anggaran yang memadai dan kepatuhan dari undang-undang yang berlaku.

Inspektorat selaku aparat internal pemerintah, tugasnya adalah mengawal. Dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan instansi pemerintah. Laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK dan DPRD ini ada kewajiban aparat internal pemerintah melakukan review terhadap laporan.

"Review ini menyakinkan bahwa seluruh transaksi keuangan dan informasi yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang selanjutnya apakah sudah terjadi sistem pengendalian anggaran yang memadai," jelasnya.

"Batasan dari review adalah lebih terbatas dari audit. Audit itu sampai pada bukti transaksi pada review terbatas kesesuaian standar pemerintah. Bagi laporan keuangan ini, tugas inspektorat adalah meyakinkan apakah laporan keuangan sudah sesuai atau tidak," paparnya. (aan)